POLITIK NASIONAL BERBASIS MORAL DALAM PEMIKIRAN BUYA HAMKA

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

ACHMAD MUNDZIR
NIM. C03206038

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2011 031
No. REG : S.2011/17/031
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Siyasah Jinayah
SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Ahmad Mundzir ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
Nip. 196707271996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mundzir ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji I,

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 196808266200501200 1

Pembimbing,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Surabaya, 22 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Mundzir
Nim	: CO3206038
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Siyasah Jinayah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul POLITIK NASIONAL BERBASIS MORAL DALAM PEMIKIRAN BUYA HAMKA adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat.

Demikian surat ini di buat, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Tertanda,

METERAI TEMPEL
ED3D9AAF746236201
6000 DJP

AHMAD MUNDZIR
NIM: CO3206038

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan "***Politik Nasional Berbasis Moral Menurut Pandangan Buya Hamka***". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pandangan Buya Hamka tentang politik nasional berbasis moralitas?

Data penelitian dihimpun melalui teknik studi pustaka selanjutnya akan didapatkan beberapa pendapat Buya Hamka tentang politik nasional berbasis moral.

Dalam skripsi ini terdapat beberapa pemikiran Buya Hamka tentang politik nasional berbasis moral, di antaranya adalah bahwasanya politik dapat dikatakan bermoral apabila pemerintahan yang menjalankan memiliki moral Agama Islam, yaitu dengan memiliki budi pekerti yang baik, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa politik nasional berbasis moral Islam adalah negara bisa dikatakan negara bermoral apabila pemimpin dan rakyatnya memiliki aturan dalam melakukan tugasnya, yang dilandasi dengan moral agama Islam. Negara berbasis moral lahir dan timbul dari suatu etika dan akhlak yang mulanya timbul dari *ketauḥidan*.

Maka dari itu penulis menghimbau agar setiap masalah tidak hanya diambil sisi negatifnya saja, tetapi beberapa pemikiran bisa lebih banyak manfaatnya, terutama bagi perkembangan politik di negara kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Kajian Pustaka 6

F. Kegunaan Hasil Penelitian 8

G. Definisi Operasional 8

H. Metode Penelitian 9

I. Sistematika Pembahasan 13

BAB II BIOGRAFI DAN PROFIL BUYA HAMKA

A. Biografi Buya Hamka 15

B. Latar belakang pendidikan dan konteks sosial politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buya Hamka 17

C. Karya-karya Buya Hamka 21

BAB III PEMIKIRAN BUYA HAMKA TENTANG POLITIK

A. Konsep Pemikiran Hamka 23

1. Definisi Politik 23

2. Bentuk Negara Republik Indonesia 26

3. Struktur Negara Republik Indonesia 27

4. Relasi Islam dan Negara 29

B. Konsep moral dalam konteks politik Indonesia 32

1. Definisi Moral/akhlak 32

2. Tujuan Moral Agama (Islam) 36

3. Ruang Lingkup Moral 38

4. Sumber-sumber Moral Islam 38

5. Pelaksanaan Moral Islam dalam Politik 43

BAB IV KONSEP MORAL DALAM KONTEKS POLITIK INDONESIA

A. Analisis Terhadap Konsep Politik Nasional Berbasis Moralitas Menurut Buya Hamka 55

B. Kelebihan dan Kekurangan dari Pemikiran Buya Hamka 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara bentuk aspek kehidupan dalam Islam adalah prinsip-prinsip dan etika hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga hal ini merupakan salah satu indikasi dan bukti bahwa dalam Islam diatur pula sistem bermasyarakat dan bernegara atau yang kemudian dikenal dengan politik Islam dengan berbagai macam teorinya yang memakai kerangka dasar pemikiran al-Qur'an dan as-Sunah.

Dalam pandangan para pemikir Islam kontemporer, ilmu politik modern tidaklah universal, dan bisa dikatakan terlalu bersifat spesifik. Hal ini karena dalam pemikirannya tidak memikirkan masalah etis fundamental terutama moral agama. Bahkan saat-saat ini politik sering diidentikan dengan perilaku negatif oleh karena perilakunya yang kurang sesuai dengan etika yang ada di Indonesia. Melihat permasalahan seperti itu perlunya suatu pemahaman yang lebih spesifik lagi terhadap kajian politik Islam.

Kajian ini akan meneliti pemikiran Hamka dengan menguraikan perihal konsep moral Islam yang berkaitan tentang tema-tema politik. Hal itu terlihat dari pemikiran Hamka, bahwa al-Qur'an sendiri tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan negara, kedua-duanya sangatlah saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyempurnakan.[1] Seperti konsep syura. Hamka memandang walaupun di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan teknik syura, tetapi dia menjelaskan bahwa syura bergantung situasi dan kondisi zaman asal tidak keluar dari moral agama (Islam). Kemudian konsep negara dan kepala negara, menurutnya terciptanya kesejahteraan suatu negara adalah karakter pemimpin dan rakyatnya harus mempunyai akhlak dalam kesehariannya.

Hamka selalu menyeimbangkan antara peran wahyu dan akal. Oleh karenanya, corak etika Hamka adalah rasional religius. Walaupun demikian, sesungguhnya secara pribadi Hamka merupakan sosok yang rasionalis karena dalam pemikiran yang lain Hamka lebih sering mengedepankan rasio, terutama untuk menjelaskan teks-teks agama. Hamka selalu mencoba menjadikan wahyu sebagai postulat-postulat, kemudian dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman.

Selain itu, Hamka adalah seorang eklektik, yang selalu berusaha menyeleksi pemikiran-pemikiran etika yang ada, dan yang kemudian mencoba menyusun sistem pemikirannya sendiri, yang antara lain, menggabungkan dari berbagai sistem pemikiran yang ada itu. Secara umum, Hamka membangun etika pembebasan yang berbasis konsep tauhid, dengan implikasi-implikasi yang sangat relevan dalam merekontruksi manusia sempurna yang sesuai dengan pembangunan sumber daya manusia. Dengan landasan ini, Hamka membangun

---

[1] Sartiman Setyawan,"Penafsiran Hamka Tentang Politik Dalam Tafsir Al- Azhar."dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--sartimanse-1526 (03 April 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka etika terapan, mulai etika pemerintahan, etika ekonomi dan etika bisnis, dan etika profesi. Oleh karenanya, pemikiran etika terapan Hamka merupakan sumbangsi yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam rangka membangun masyarakat yang berbudi luhur.

Hamka juga pernah menyinggung betapa pentingnya seorang muslim hidup konsisten. Yang beliau ditekankan di sini terutama seorang muslim yang wajib memiliki ilmu pengetahuan. Seorang muslim yang memiliki ilmu pengetahuan akan berbeda dengan orang muslim yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, karena hal ini akan berdampak pada perilaku orang tersebut dalam berpolitik.[2] Hal ini dirasa sangat penting untuk dikaji dalam penelitian ini, karena di negara kita saat ini banyak kita temui banyak sekali penyimpangan di mana-mana, terutama dalam dunia perpolitikan.

Dalam hal ini, kajian moral dan politik Hamka selalu fokus dan merasa penting akan adanya pengkajian tentang apa yang pernah digagas oleh Hamka di tahun-tahun sebelumnya. Selayaknya negara kita bisa mengambil apa yang pernah di usulkan dan digagas oleh Hamka, seperti yang terjadi pada tahun 1970an, ketika itu Gubernur DKI Jakarta yang dipegang oleh Ali Sadikin, sempat ditentang kebijakanya oleh Hamka, karena saat itu Ali Sadikin sempat melegalkan adanya perjudian dan prostitusi, guna mengeruk dana sebanyak-banyaknya untuk mempercepat pembangunan DKI Jakarta. Hal ini ditentang

[2] Ahmad Hakim M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama*,Tafsir Politik Hamka (Yogyakarta: UII Press, 2005), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras oleh Hamka dengan argumennya, beliau menegaskan bahwa apapun alasanya melegalkan perjudian dan prostitusi itu adalah tindakan amoral yang jelas bertentangan dengan nilai moral Agama Islam. Oleh karena itu Hamka menyatakan bahwa kebijakan itu harus segera dihapus, karena melegalkan perjudian sama dengan telah mengkhianati perjuangan kemerdekaan dulu. Menurut hamka, membebaskan diri dari penjajah artinya menjauhkan segala bentuk penindasan. Tindakan melegalkan perjudian dan prostitusi identik dengan menghadirkan penjajahan bentuk baru.[3]

Hal lain juga ditegaskan oleh Hamka, yakni masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) hal ini sudah menjadi problem lama dari bangsa Indonesia, bagi Hamka problem ini menjadi tanggung jawab muslim untuk konsisten menegakkan kebenaran moral agama (Islam), apapun yang terjadi. Intinya adalah satu kata dan perbuatan.[4]

Kemudian tentang hubungan internasional menurut Hamka, Islam tidak melarang manusia bekerjasama dengan orang kafir asal mereka tidak memerangi dan mengusir kita dari kampung halaman kita. Tentang moral politik agama, Hamka lebih menyoroti kepada sikap konsisten pelaku politik dalam perilaku politiknya.

Hamka juga mengikuti jalan Nabi Muhammad, yakni perjuangan bukanlah hanya untuk mencapai suatu kekuasaan atau untuk mencapai jabatan tertinggi

---

[3] Ibid, 70
[4] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai kepala negara. Sekali-kali beliau tidaklah mengingat itu, yang ditujunya hanyalah kebesaran agama, tegaknya syiar Allah dan keluarnya manusia dari kegelapan, syirik kepada terang benderangnya iman. Tetapi meskipun beliau tidak menuju kekuasaan, namun kekuasaan pun tercapai. Akhirnya kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi menjadi alat untuk melancarlkan agama. Beliau datang membawa satu ideologi, yaitu Islam. Kemudian dengan sendirinya terbentuk suatu kekuasaan di Madinah.[5]

Kemudian persoalan-persoalan di bidang muamalah atau kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan manusia adalah termasuk masalah agama. Sehingga berawal dari penjelasan ini, Hamka menarik satu garis besar bahwa urusan agama tidak bisa lepas dari negara, dan begitu pula sebaliknya.

Dalam karyanya yang lain, Hamka menjelaskan bahwa di dalam tarikh Islam tidak pernah ditemukan pemisahan antara agama dan negara, dalam ajaran Islam pun tidak ada yang demikian. Kemudian pada penjelasan akhir, bahwa tidak ada satu sebab atau alasan bagi kita dalam masyarakat Indonesia khususnya untuk menyisihkan agama dari masyarakat dan negara, karena akan menyalahi tabiat dan sejarahnya.[6]

---

[5] Ibid, 63
[6] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Indentifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Makna politik nasional dalam pandangan Hamka
2. Ruang lingkup politik moral di masyarakat
3. Konstelasi politik Indonesia di masa Hamka
4. Ideologi politik nasional islam di Indonesia
5. Pertarungan politik islam dan sekuler di Indonesia
6. Peran ulama dalam politik nasional

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Buya Hamka tentang konsep politik nasional berbasis moralitas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai mana berikut:

1. Untuk memahami pandangan Buya Hamka tentang konsep politik nasional berbasis moralitas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal sampai akhir, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji secara spesifik tentang pemikiran Hamka mengenai konsep negara politik nasional yang berbasis moral.

Diantara penelitian yang membahasnya adalah sebagai berikut:

1. A. Hakim dan M.Tholhah yang berjudul "*Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*" .Buku ini menyebutkan bahwa syarat penting agar politik itu bersifat mulia tak lain harus berpijak pada moral agama Islam. Buku ini membahas tentang konsep politik Islam dari ayat al-Qur'an dalam Tafsir al-Azhar.
2. Karya Ilmiah berupa skripsi oleh Ummu Habibah mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin tahun 1999, yang berjudul "*Pandangan Buya Hamka Tentang Wanita*". Di sini penulis berpendapat bahwa menurut Hamka wanita itu sangat mulia baik dari segi penciptaanya maupun dari segi keberadaanya, sedangkan penilitian yang saya teliti sekarang membahas tentang politik di Indonesia.
3. Karya Ilmiah berupa skripsi oleh Mintu Fathinadhiroh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin tahun 1996, yang berjudul "*Pemikiran Buya Hamka Tentang Aspek Tauhid*". Di sini penulis berpendapat bahwa menurut Hamka wujud Allah dapat dibuktikan dengan memperhatikan adanya kejadian manusia dan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada alam, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang saya teliti sekarang membahas tentang aspek-aspek politik di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam pada Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah Jinayah.
2. Segi Praktis yaitu bagi para praktisi politik dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan politik yang berbasis etika dan moral Islam di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi secara konseptual baik dari kamus maupun ensiklopedia, maka definisi judul skripsi ini "Politik Nasional Berbasis Moral Dalam Pemikiran Buya Hamka"

Perlu dijelaskan secara operasional dengan harapan sebagai pijakan awal untuk memahami maksud kajian dan uraian lebih lanjut. Definisi konsep ini juga dapat menghindari kesalah pahaman dalam memberi orientasi terhadap studi ini.

Politik nasional	Ilmu kenegaraan di Indonesia[7], dalam konteks ini politik moral yang berbasis agama Islam dan ideologi Pancasila.[8]

[7] Ahmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Dengan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), 408
[8] Ibid, 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbasis Moral	Moral dalam hal ini adalah etika, dan dalam konteks ini adalah akhlak yang mulia, yang dalam penerapanya menggunakan sikap moral agama Islam, dan nilai budaya Indonesia.
Pemikiran Buya Hamka	Pendapat Buya Hamka sebagai seorang ulama sekaligus politikus di Indonesia. Buya Hamka lahir tahun 1908, di desa kampung Molek, Meninjau, Sumatera Barat, dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat menjadi HAMKA

Deskripsi dari definisi operasional di atas adalah konsepsi politik nasional dengan menggunakan aturan atau etika moral Islam dalam penerapan segala tindakan, menurut pendapat Buya Hamka.

H. Metode Penelitian

Kajian tentang *Politik Nasional Berbasis Moral Dalam Pemikiran Buya Hamka* ini termasuk kajian historis dan bersifat eksploratif karena merekam dan menganalisis fenomena pergulatan politik yang dibangun oleh kelompok masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penelitian memuat uraian tentang:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan, yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, bagaimana pandangan Buya Hamka tentang politik nasional berbasis moralitas. Di antaranya adalah data yang bersumber dari tulisan-tulisan karya Hamka yang menjelaskan tentang konsep politik nasional berbasis moral. Data ini meliputi, di antaranya:

a. Data tentang pemikiran Buya Hamka tentang politik nasional
b. Data tentang politik berbasis moralitas menurut Buya Hamka
c. Data tentang ideologi politik Pancasila menurut Buya Hamka

2. Sumber data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah buku-buku dan tulisan karya buya Hamka. Diantaranya sebagai berikut:

1) *Studi Islam* karya Hamka, cetakan pertama Januari 1982. Yang di dalamnya menyebutkan, bahwa kita harus taat pada pemerintah, tetapi kalau terjadi pertikaian pendapat dengan pemerintah keduanya wajib *bertakhim* kepada Allah dan Rosul kembali.[9]

2) *Diri Dan Masyarakat* dalam artikel Panji Masyarakat no. 657, di sini Hamka menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai keinginan dan

[9] Hamka "*Studi Islam*" Cetakan Pertama, 1982. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan yang berbeda, apabila dibiarkan masing-masing mendahulukan kepentingan itu, pasti akan menimbulkan bentrokan antar sesama.

3) *Tafsir al-Azhar* juz IV dalam surat al-Maidah ayat 34 oleh Hamka, di dalam tafsirnya Hamka menyebutkan bahwa kita boleh kritis terhadap kekuasaan yang ada, apabila penguasa tersebut berbuat zalim. Hal ini dapat disamakan dengan politik tanpa moral agama.

4) *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial,* oleh Hamka, di dalam karya ini Hamka menyebutkan dalam berevolusi kita harus menggunakan dasar Islam, di antaranya mentauhidkan Allah, memperteguh ukhuwah, mengingat bahwa Islam diturunkan bukan dengan kesulitan dan tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan yang lain.

5) *Hak Perseorangan* dalam artikel ini di Panji masyarakat No.659/Tahun 1990. Hamka menjelaskan kita sebagai seorang muslim bagian dari masyarakat mempunyai hak untuk mengembangkan kehidupan kita.

6) *Kewajiban Mukmin* ,dalam artikel panji msysarakat No.658/Tahun 1990 Hamka mengulas asal mula adanya hukum, yang menurut beliau hukum bermula dari adat kebiasaan, dan selanjutnya ketika sudah menjadi sebuah aturan sebagai seorang muslim kita harus mematuhinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Pandangan Hidup Muslim* dalam karya ini Hamka menjelaskan bagaimana cara kita mencintai tanah air, dengan dasar hadits yang artinya: Cinta tanah air adalah sebagaian dari Iman.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah karya, tulisan, artikel yang membahas tentang pemikiran Hamka. Dan pemikiran-pemikiranya. Serta karya ilmiah dan data-data yang dapat menunjang peneletian serta ada hubunganya dengan pelengkap data untuk skripsi yang peneliti teliti. Antara lain adalah:

1) Buku karya Abdul Haris yang berjudul, Etika Hamka kontruksi Etik Berbasis Rasional Religius.
2) Buku karya A. Hakim dan M. Tholhah yang berjudul, Politik Bermoral Agama, Tafsir politik Hamka

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang didapat dari penelitian data, atau literatur-literatur yang ada, baik berupa buku-buku, dokumen, maupun dari berbagai sumber, artikel dengan teknik bibliografi. Penulis dalam pengumpulan data ini menggunakan cara mengumpulkan data yang ada dalam literatur-literartur melalui kajian pustaka dengan cara membaca, mempelajari serta menelaahnya, yang kemudian disajikan dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif. Selanjutnya data dianalisis dengan deskriptif-analitis untuk mendapatkan kajian yang menyeluruh sebagai hasil penelitian.

4. Teknik mengolah data

Teknik mengolah data yaitu, meliputi mengedit beberapa tulisan yang dirasa perlu untuk adanya pengeditan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dan mengkatagorikan data-data yang senada agar tidak terjadi kerancuan nantinya dalam penulisan.

5. Teknis analisis data

Setelah data terkumpul, peneliti kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola berfikir deduktif, yakni memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan diawali tentang *Politik Nasional Berbasis Moral.* Selanjutnya peneliti menguraikan data-data tentang pemikiran Hamka yang ada dalam Buku-buku dan dan tulisan-tulisanya yang berkaitan tentang moral Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dan mempelajari apa yang ada dalam penelitian ini, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan: memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan memilih judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Biografi dan profil Buya Hamka yang meliputi Biografi Buya Hamka, Latar belakang pendidikasan dan konteks sosial politik Buya Hamka, dan Karya-karya Buya Hamka.

Bab III : A. Konsepsi Pemikiran Buya Hamka tentang politik Indonesia : meliputi definisi Politik, Dasar hukum politik nasioanl, bentuk Negara Republik Indonesia, struktur Negara Republik Indonesia dan ralasi Islam dan negara.

B. Konsep moral dalam konteks politik Indonesia, yang meliputi: definisi moral/akhlak, tujuan moral agama (Islam), ruang lingkup moral, sumber-sumber moral Islam dan pelaksanaan moral Islam dalam politik.

Bab IV : Analisis Pemikiran HAMKA perihal apalikasi poitilik Nasional: berisi tentang analisa negara berbasis moral dalam konteks ke Indonesiaan menurut Buya Hamka.

A. Analisis terhadap konsep politik nasional berbasis moralitas menurut Buya Hamka

B. Kelebihan dan kekurangan dari Pemikiran Buya Hamka.

Bab V : Penutup: berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI DAN PROFIL BUYA HAMKA

A. Biografi Buya Hamka

Buya Hamka lahir 17 Februari tahun 1908, di desa kampung Molek, Meninjau, Sumatera Barat, dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat menjadi HAMKA.[1]

Belakangan ia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab, yang berarti ayah kami, atau seseorang yang dihormati.

HAMKA (1908-1981), adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah (*tajdid*) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906.[2]

Beliau adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, dan aktivis politik. Belakangan ia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau

---

[1] Abdul Haris, *Etika Hamka Konstrksi Etik Berbasis Rasional Religius*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), ix

[2] Ahmad Hakim, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, ...,25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab, yang berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906.[3]

Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Husayn Haykal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, AR Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.[4]

---

[3] Ahmad Hakim, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, ...,25

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Latar Belakang Pendidikan Dan Seting Sosial Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan HAMKA adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia. Beliau dikenal dengan pemikiran-pemikiranya tentang etika (Islam). Konstruksi etika Hamka dibangun di atas fondasi tawhid dan filsafat. Menurutnya, motivasi perbuatan moral seorang mulsim itu bersifat transendental, yakni mencari ridla Allah swt., untuk kebahagiaan dunia akhirat. Perbuatan moral seorang muslim hendaknya didasari pndangan dunida tawhid yang melampaui kepentingan pragmatis. Di sinilah tampak sekali dalam pemikiran etika Hamka, perpaduan serasi antara bangunan agama yang religius dan filsafat yang regional. Maka tidak salah bila pemikiran etika Hamka disebut dengan corak etika berbasis rasional-religius.

Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga Darjah Dua. Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo.[5]

Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929. HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Muhammadiyah, Padangpanjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).[6]

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.[7]

Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau

---

[6] Ibid.

[7] Ahmad Hakim, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka...* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun1966, Hamka telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia.[8]

Adapun pemikiran Hamka tentang politik nasional berbasis moral timbul ketika tahun 1970, ketika itu Gubernur DKI Jakarta yang dipegang oleh Ali Sadikin, sempat ditentang kebijakanya oleh Hamka, karena saat itu Ali Sadikin sempat melegalkan adanya perjudian dan prostitusi, guna mengeruk dana sebanyak-banyaknya untuk mempercepat pembangunan DKI Jakarta. Hal ini ditentang keras oleh Hamka dengan argumennya, beliau menegaskan bahwa

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apapun alasanya melegalkan perjudian dan prostitusi itu adalah tindakan amoral yang jelas bertentangan dengan nilai moral Agama Islam. Oleh karena itu Hamka menyatakan bahwa kebijakan itu harus segera dihapus, karena melegalkan perjudian sama dengan telah mengkhianati perjuangan kemerdekaan dulu. Menurut hamka, membebaskan diri dari penjajah artinya menjauhkan segala bentuk penindasan. Tindakan melegalkan perjudian dan prostitusi identik dengan menghadirkan penjajahan bentuk baru.

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an lagi, Hamka menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.

Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli.

Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia.

Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai.[9]

C. Karya-Karya Buya Hamka

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa buah surat kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.[10]

Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti:

Karangan di bidang sastra:

---

[9] Ibid.
[10] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Merantau ke Deli, Di dalam Lembah Kehidupan, Dijemput Mamaknya, Keadilan Ilahi, Tuan Direktur, Terusir, Margaretta Gauthier.

Karangan di bidang keagamaan Islam:

Pedoman Mubaligh Islam, Agama dan Perempuan, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Lembaga Budi.

Dan pada tahun 1945, Hamka menerbitkan karya-karyanya di bidang politik dan budaya, yakni:

Negara Islam, Islam Demokrasi, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama dan Dari Lembah-lembah Cinta.

Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN BUYA HAMKA TENTANG POLITIK

A. Konsep Pemikiran Hamka

1. Definisi Politik

Sebagai langkah menuju pemahaman yang lebih terarah, pada bagian ini akan diuraikan tentang istilah politik itu sendiri. Hal ini lebih didasarkan pada istilah politik yang telah mengalami pasang surut dan segi pemaknaannya, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti bahwa pemaknaan politik itu sendiri sering berubah arah dengan berbagai interpretasi yang berkembang seiring kondisi dan keadaan yang ada, yakni perubahan ruang dan waktu yang mempengaruhi segala hal yang baru, termasuk di dalamnya adalah politik.[1]

Etimologis kata 'politik' berasal dan bahasa Yunani, yaitu *polis*, yang dapat berarti kota atau negara-kota. Dan *katapolis* ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperti *polites* (warga negara) dan *politikos* nama sifat yang berarti kewarganegaraan (*civic*),' dan politike techne untuk kemahiran politik serta *politike episteme* untuk ilmu politik. Kemudian orang Romawi mengambil secara over perkataan Yunani itu dan menamakan pengetahuan

[1] Ahmad Hakim M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama*,Tafsir Politik Hamka (Yogyakarta: UII Press, 2005), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

tentang negara (pemerintah) dengan *ars politica*, artinya kemahiran (*kunst*) tentang masalah-masalah kenegaraan.[2]

Terhadap hal ini, *politics* (politik) biasa ditafsirkan sebagai ilmu dan kemahiran memerintah, atau sebagai ilmu yang mencakup ilmu politik dan falsafah politik. Ada pula sarjana-sarjana yang *skeptis* terhadap sifat ilmiah dan ilmu, dan oleh karena itu, dikemukakan suatu pembagian politik itu sendiri atas politik teoretis dan politik praktis (*theoretical and applied politics*). Politik teoretis, berbicara mengenai keseluruhan dan asas-asas dan ciri-ciri yang khas dan negara tanpa membahas aktivitas dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan politik praktis, mempelajari suatu negara sebagai lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuantujuan tertentu, yaitu negara sebagai lembaga yang dinamis.[3]

Sir Frederick Pollock, pemikir politik dan Inggris, sebagaimana telah dikatakan di atas, juga membuat dikotomi seperti itu, bahwa politik teoretis meliputi beberapa teori, yaitu; 1) teori negara; 2) teori pemerintah; 3) teori perundang-undangan; dan 4) teori negara sebagai pribadi buatan *(art ifi cial person*). Sedangkan politik praktis meliputi beberapa hal, yakni; 1) negara (bentuk-bentuk negara yang nil dan pernerintah); 2) pemerintahan (cara bekerja pemerintah dan lain-lain); 3) Undang-undang dan perundang-

[2] Ibid, 40
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan (prosedur, pengadilan dan sebagainya); dan 4) negara yang dipribadikan (diplomasi, perdamaian, peperangan, persetujuan persetujuan internasional).[4]

Dalam sebuah karya berjudul Pengantar Pemikiran Politik, Deliar Noer menyebutkan bahwa, perkataan 'politik' mengandung berbagai makna yang sangat luas, yakni kekuasaan, kekerasan, wibawa, pengaruh, hubungan dua pihak, perasaan dan keinginan, kepentingan, nilai, keyakinan dan agama, milik, status dan kelas, tujuan, dan ideologi. Akan tetapi, dan sekian arti atau makna tersebut, ia lebih mendasarkan kesemuanya itu pada makna kekuasaan, karena makna ini dapat meng*cover* makna-makna tersebut, dan bukan sebaliknya .[5]

Sedangkan Karl W. Deutch, mengatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan secara umum. Kemudian dijelaskan juga bahwa pengambilan keputusan-keputusan seperti ini berbeda dengan pengambilan secara pribadi oleh seseorang, dan keseluruhan keputusan itu merupakan sektor umum atau sektor publik dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan-tindakan umum atau nilai-nilai.[6]

---

[4] Ibid.

[5] Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Polilik*, Cet. I (Jakarta: Rajawali, 1983), 5-47.

[6] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk Negara Republik Indonesia

Negara dalam pandangan Hamka dengan latar belakang kesamaan keyakinan. Hal ini dapat berarti pula bahwa unsur pembentuk negara berawal dari suatu komunikasi yang mempunyai satu pandangan atau keyakinan yang tersentralisasi pada satu focus pandangan yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan komunitas tersebutk dengan atribut keyakinakannya itu dalam suatu wadah besar yang kemudian disebut dengan negara.[7]

Sedangkan tegak berdirinya suatu negara itu bermula sejak manusia mengenal musyawarah dan bernegara. Dan karena itu musyawarah tersebut merupakan unsur mungkin suatu negara akan terbentuk jikalau para penghuni Negara tersebut tidak pernah bermusyawarah antara satu dengan yang lain, karena suatu permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur atau suku yang berbeda dapat mencapai suatu kesepakatan bersama, jika setiap anggota tersebut mempunyai tujuan dan keyakinan yang sama, yakni dalam hal ini berupa ide untuk mendirikan suatu negara.

Akan tetapi dalam pandangan tokoh-tokoh lain, pendapat di atas relatif agak berbeda dengan pendapat para pemikir politik Islam lain. Seperti halnya al-Ghazali, Ibnu Abi Rabi dan al-Farabi, yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan

[7] Ahmad Hakim M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2005),74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi dengan pihak lain, dan inilah yang melatarbelakangi terbentuknya suatu negara.[8]

3. Struktur Negara Republik Indonesia

Hamka mengatakan bahwa suatu umat ialah semua kaum yang telah terbentuk menjadi suatu masyarakat atau kelompok, mereka menjadi satu oleh karena persamaan keyakinan.[9] Hal ini berarti bahwa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu yang homogen. Wilayah negara tersebut senantiasa dipenuhi oleh pluralitas yang ada di wilayah tersebut dengan berbagai konsekuensi yang mengharuskan mereka untuk hidup bersama dalam satu wilayah dan negara tertentu. Menurut Hamka, kesamaan pandangan untuk dapat hidup bersama tersebut adalah karena persamaan keyakinan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama, walaupun sumber dari berbagai unsur yang berbeda, sehingga awal dari proses inilah suatu negara bisa terbentuk, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:

---

[8] Ahmad Hakim, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama....* 74
[9] Ibid, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"*Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu salaing mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal*".[10]

Bisa juga dikatakan bahwa Islam itu sangat menghargai dan menghormati perbedaan, baik yang berasal dari kaum muslim maupun non muslim, kaya maupun miskin, tuan ataupun budak, dan lain sebagainya. Sejak periode madinnah hal ini tertuang di dalam Piagam Madinnah. Karena mustahil jika suatu perbedaan tidak dapat dirukunkan akan bisa terbentuk suatu negara. Suatu yang timbul hanyalah konflik yang akan ada, jika semuanya itu berjalan dengan keyakinan dan prinsip masing-masing, dan dengan kebersamaan dan persatuan itulah suatu negara bisa terbentuk.[11]

Mengenai tegak berdirinya suatu negara atau kekuasaan itu juga tidak terlepas dari konteks poengetahuan manusia ketika mengenal bermusyawarah dan bernegara, di mana kekuasaan dari segala terbentuknya adalah milik

[10] Ibid.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, yang telah menjadikan manusia sebagai pemimpin atau khalifah untuk menjalankan kekuasaan tersebut yang dibarengi dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dalam nash.

Dalam keyakinan Islam, ketika kita mengatur negara bersama-sama adalah atas kehendak Tuhan, kita mengangkat pemerintahan, kepala negara dengan nama raja, sultan, presiden dan lain-lain adalah atas kehendak sendiri. Kepala negara diakui Tuhan dalam memegang kekuasaan dan diberi batas-batas syarat tertentu didalam nash adalah karena kita diangkatNya sebagai khalifah untuk menjalankan kekuasaan tersebut di dunia. Hal ini Hamka menyebutnya dengan istilah "*demokrasi taqwa*" [12]

4. Relasi Islam dan negara.

Hubungan agama dan negara telah diperdebatkan sejak lama. Bahkan, masalah ini dianggap pemicu pertama kalinya konflik intelektual dalam kaitannya beragama dan bernegara. Hubungan agama dan negara, dalam perjalanannya, tentu tidak dapat lepas dari pengaruh warisan budaya maupun peradaban yang membentuknya.

Suatu bangsa bisa naik membumbung tinggi, disegani dan membawa faedah bagi kemanusiaan, selama akhlak bangsa itu masih tegak. Dan mereka pun berangsur-angsur tumbang apabila nilai-nilai akhlak sudah tiada lagi.

---

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kronologi waktu, ada tiga peradaban besar yang mempunyai peranan penting terhadap pembentukan tradisi keilmuan dan pemikiran politik dewasa ini. Ketiganya secara berurutan, yaitu, Yunani-Romawi, Judeo-Kristiani, dan Islam dengan masing-masing sumbangan khasnya. Peradaban Judeo-Kristiani dan Islam tidak lebih dari penerus tongkat estafet yang telah diberikan oleh induk peradaban dunia (Yunani-Romawi) sebelumnya terkait tradisi pemikiran politik.

Arnorld Toynbee mengatakan, peradadaban Judeo-Kristiani yang berkembang awal abad XII-XIII dianggap tidak terlalu memberikan sumbangan berarti bagi "Dunia Barat" dewasa ini, karena apa yang kita lihat terhadap peradaban Barat modern sekarang merupakan kelanjutan dari keinginan untuk menghidupkan kembali dan pengulangan pandangan hidup orang-orang Yunani yang telah ada ribuan tahun lalu. Seperti cita-cita kebebasan, optimisme, sekulerisme, dan tradisi kehidupan beragama-bernegara sebagai entitas yang berbeda. Sementara, peradaban Islam tampaknya tidak begitu mampu mewarnai dan berkontribusi banyak terhadap wajah sisitem politik dunia, karena memang ada usaha-usaha untuk meminggirkannya dari percaturan politik internasional.

Hamka juga pernah berpendapat bahwa Islam tidak mengenal apa yang pernah dikatakan orang, bahwa: "agama adalah urusan pribadi. Adapun soal-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

soal kehidupan ini tidaklah ada sangkut-pautnya dengan agama. Kita boleh mengatur hidup kita menurut kemauan kita sendiri, dengan agama tak usah dicampur-adukkan ke dalamnya."

Sebagai orang yang beriman kami tidak dapat menerima ini . karena kata-kata begini terang berasal dari luar agama.

Dalam do'a-do'a yang selalu diucapkan oleh orang Islam tersebut dengan jelas:

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"*Ya Tuhan kami anugerahilah kiranya kami suatu kebajikan di dunia ini dan suatu kebajikan juga di akhirat, dan peliharalah kiranya kami dari pada siksa api neraka.*"

Segala kegiatan hidup, termasuk bernegara, politik, sosial, ekonomi dan niaga, adalah dunia. dan untuk melanjutkan perjalanan ini ke akhirat, kita harus lebih dahulu melalui dunia ini. Dan keduanya ini, dunia dan akhirat kita padukan dalam iman, dalam agama.[13]

Lantaran itu iman kita kepada Allah berarti: kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengatur seluruh yang ada ini. Dari micro cormosnya

[13] Hamka "*Studi Islam*" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai macro cosmosnya. Sebab hanya Dia saja yang berhak dipuja dan disembah. Itu yang dinamai dalam Islam Tauhid Ubudiyah.

Dalam hal ini, Hamka mengemukakan titik pemikirannya pada penyatuan antara agama dan negara, karena di satu sisi, negara sangat membutuhkan agama sebagai fundamen utama dalam pembentukan moralitas suatu bangsa.

B. Konsep moral dalam konteks politik Indonesia

1. Definisi moral/akhlak

Kata moral berasal dari bahasa latin "*mos*" bila tunggal jamaknya "*mores*" yang berarti kebiasaan atau tingkah laku.

Demikian para pakar ilmu-ilmu sosial mendifinisikan moral.

Yaitu moral mempunya empat makna:

a. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam suatu zaman atau oleh sekelompok orang. Dengan makna ini moral bisa bersifat keras buruk atau rendah.
b. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan bukannya berdasarkan syarat.
c. Moral adalah teori akal tentang kebagikan dan keburukan, ini menurul filsafat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Moral adalah tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanism yang kental yang tercipta dengan adanya hubungan-hubungan sosial.14

Dalam hal ini penulis mengartikan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat.

Aspek moral dalam bidang politik merupakan satu isu yang krusial. Belakangan ini, tampaknya telah menjadi semacam pendapat yang diterima masyarakat bahwa politik sering kali diasosiasikan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Karena itu, politik merupakan sebuah dunia di mana orang-orang menjanjikan yang belum tentu akan terpenuhi di kemudian hari, serta obral kata-kata yang memeang dari sejak semual telah direncanakan untuk memberikan kesan yang tidak benar bagi para pendengar. Orang mengadakan perjanjian-perjanjian rahasia yang sama sekali tidak akan dapat diterima masyarakat apabila mereka mengetahuinya. Dalam politik, orang melakukan segala tindakan yang tidak sesuai dengan budi pekerti, moral dan akhlak yang mulia. Kenyataan seperti ini telah menjadikan kata politik memiliki konotasi yang tidak terhormat.[15]

Manakala perkataan akhlak menurut Bahasa ialah: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (*al-akhlāku*) iaitu kata jama' daripada perkataan

[14] Skripsi oleh: Muhammad Zainuri, *Etika menurut Ibnu Maskawaih.* Jombang: IKAHA. 2005, 3

[15] A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam* Islam, Timur Tengah, dan Benturan Ideologi,(Jakarta: Pensil 324, 2004), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*al- khuluqu*) berarti tabi'at,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga berarti agama itu sendiri. Perkataan (*al-khuluq*) ini di dalam Al- Quran hanya terdapat pada dua tempat saja, antaranya ialah:

Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (al-Qalam:4).

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung".

Sementara perkataan (al-khalqu) berarti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik . Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa arti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam al-Quran terdapat 52 perkataan (Al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala:

Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum

Sidi Gazalba mengatakan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Untuk itu , dia menyimpulkan bahwa moral itu suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan social atau lingkungan tertentu.

Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua- dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya.

Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut:

Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keridaan Allah (*Ridwaanullah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan *ẓahir* dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar.

2. Tujuan moral agama (Islam)

Moral bisa dijadikan sebagai penunjuk kualitas dan martabat manusia. Tingkat moral merupakan harkat dan martabat manusia secara normative, moralitas adalah norma atau standar tingkah laku yang didasarkan atas pertimbangan benar atau salah, baik atau buruk. Persoalan moral adalah bagaimana manusia menahan diri sendiri, menunda kesenangan atau atau keinginan dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Lain halnya dengan binatang yang tidak bisa mengendalikan diri, karena binatang tidak memiliki moral. Moral bersifat normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka baik dan buruk yang dianggap sebagai nilai mutlak atau transenden, yaitu keseluruhan dari kewajiban-kewajiban manusia. Moral mengacu pada baik buruknya manusia terkati dengan tindakannya, sikapnya, dan cara pengungkapannya. Jadi, moral merupakan hal yang harus dilakukan manusia. Moral menunjukan kualitas dan martabat kepribadian manusia. Tingkat moral merupakan harkat dan martbat manusia secara nomatif.

Pribadi yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan sebagi kebajikan, serta menegakkan hak asasi yang seimbang dengan kewajiban asasi adalah contoh manusia yang memiliki kesadaran moral yang memadai. Sedangkan etika membahas makna moral, merupakan pemeliharaan sistematis tentang moralitas atau menyangkut upaya menjadikan moralitas sebagai landasan berperilaku. Dalam Islam bisa disebut akhlak sebagai pranata perilaku yang didasarkan pada inilai ihsan, nila iman, dan nila Islam. Sering dikenal akhalakul karimah yang bersumber pada nila Ilahiah (al-Qur'an dan sunnah) yang mengatur ibadah dan mu'amalah, dan nilai duniawi yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Menurut etika Islam, akhlak harus berkualifikasi ihsan untuk mencapai al-Islam. Pentingnya akhlak mulia itu sesuai dengan hadist Rasulallah saw. " sesungguhnya tidaklah akau diutus keculai untuk menyempurnakan kutamaan akhlak".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Etika politik merefleksikan kualitas moral para pelaku potik dan sekaligus maslah tatanan hidup kemasyarakatan, hokum keadilan, karena tika poltik akan berpegang pada nilai-nilai norma, etik dan moral.

3. Ruang lingkup moral

Etika yang dibangun Hamka yang didasarkan di atas keyakinan agama (berbasis *tauḥid*) tampaknya yang kemudian akan banyak dapat mencegah kemrosotan moral bangsa ini. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi isu sentral dalam proses reformasi di Indonesia. Menjelang dan sesudah rezim orde baru jatuh. Tampakanya juga akan dapat diatasi dengan konsep etika yang ditawarkan oleh Hamka.

4. Sumber-sumber moral Islam

Hamka menyatakan bahwa pandangan hidup muslim adalah tauḥid, sehingga semua aktifitas hidupnya berdasar padanya, termasuk di dalamnya akhlak atau moral. Sebagaimana pernyataannya berikut:

> "*sungguh kepercayaan tauḥid yang ditanamkan demikian rupa melalui agama yang diajarkan oleh Nabi saw., membentuk akhalak penganutnya. Akhlak yang tabah dan teguh. Sebab tidak ada tempat takut, tidak ada menyerah menyerah, tempat berlindung melainkan Allah. Akhlak yang teguh ini dikuatkan lagi oleh suatu pokok keprcayaan, yaitu takdir. Segala sesuatu di alam mini, sejak dari kejadian langit dan bumi, sampai kepada makhluk yang sekecil-kecilnya, melalui adanya dengan ketentuan dan jangka waktu. Hiduppun menurut jangka waktu, matipun menurut menurut ajal.*"[16]

[16] Abdul Haris"*Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*"..... 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka juga mengatakan "menurut sosiologi modern, kebebasan seseorang diikat oleh undang-undang syari'at. Dan syari'at bersumber dari akhlak. Dah akhlak bersumber dari kepercayaan kepada Allah."[17]

Beberapa pernyataan hamka di atas menunjukkan bahwa *tauḥid* sebagai sumber kepercayaan dalam islam. Menjadi sangat sentral karena menempati pada posisi yang amat dalam, atau menjadi inti dari ajaran Islam. Ini berarti bahwa tauhid menjadi sumber bagi tindakan moral bagi seorang Muslim.[18]

Moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada pesan (ketentuan) Allah Yang Maha *universal*.

Seorang Muslim yang bersikap demikian akan mengarahkan pandangan hidupnya pada spektrum yang luas, tidak berpandangan sempit ataupun eksklusif. Ia dapat menerima realitas sosial yang beragam dan memupuk pergaulan dengan berbagai kalangan tanpa membatasi diri dengan sekat agama, kultur, dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.

---

[17] Ibid, 70
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa moral Islam adalah takwa itu sendiri. Artinya dengan kekuatan takwanya, seorang Muslim mampu menanamkan moral Islam di tengah-tengah perbedaan sosial dan budaya masyarakat secara toleran, demokratis, terbuka, dan tanpa mengklaim dirinya paling benar.

Ulama *Ṣufi* membagi moral ke dalam tiga jenis, yaitu moral agama, moral undang-undang, dan moral lingkungan sosial. Dari ketiga jenis moral tersebut, yang paling dominan adalah moral agama dan menjadi sumber acuan bagi kedua moral yang lainnya. Itulah sebabnya, ajaran Islam selalu menekankan kepada semua umatnya agar senantiasa berpegang teguh pada moral Islam. Sayangnya, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang yang tunduk pada selain moral agama. Dari kalangan penguasa, pengusaha, dan politisi, misalnya, masih banyak yang tunduk pada tatanan sistem politik yang hegemonik demi keuntungan pribadi, ketimbang membela rakyat dan masyarakat lemah dari ketertindasan.

Kasus lainnya, ada seorang agamawan yang dahulunya menjadi panutan masyarakat, pribadinya baik, tutur katanya lembut, sikapnya sopan, dan tidak pernah lupa mengenakan simbol-simbol keagamaan, kini justru berubah. Ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenggelam dalam dunia kekerasan dan dunia kemewahan setelah menceburkan diri dalam lingkungan pergaulan yang hedonis.

Hamka juga mengatakan bahwa kepercayaan kepada Allah itu sebagai titik tolak dan sekaligus menjadi tempat berpijak seorang muslim. Dalam hal ini dia mengatakan, "kepercayaan yang satu *(tauḥid)* itulah yang disuruh pelihara baik-baik, dipegang teguh-teguh, sebab inilah 'pangkal tempat bertolak' dan ini pula keputusan dan segala hukum."62 Hamka juga mengatakan bahwa "aqidah tauḥid adalah pokok hidup mereka. Aqidah tauhid adalah hakikat hidup mereka"6 dan ia juga mengatakan "*tauḥid* itulah yang memberi nilai hidup."[19]

Hamka melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan "Kalau di dalam alam besar cakrawala ada matahari yang tidak pernah padam cahayanya, maka di dalam alam kecil, yaitu insan pada din kita, kepercayaan itulah matahaninya."

Menurut Hamka, *tauḥid* inilah yang sebenarnya merupakan sumber kekuatan dalam kehidupan seorang muslim dan sekaligus sebagai sumber moral. Sebagaimana dia mengatakan bahwa "Maka percaya kepada Allah, itulah yang menghilangkan segala rasa takut, ragu, waham, dan

[19] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syakwasangka!" kemudian pernyataannya itu dikuatkan dengan penyataan berikut ini :

"*Percaya kepada saw Tuhan, itulah yang memberi sinar dan dalam jiwa sendiri, walaupun alam keliling gelap gulita. Percaya kepada Tuhan Yang Satu adalah dinamo yang menghidupkan autoactiviteit dalam diri. Sehingga hidup itu datang dari dalam, bukan dipompakan dan luar. Itulah yang memberi petunjuk mana yang saiah, mana yang benar. Mana yang ma'ruf mana yang munkar. Mana yang ḥaq, mana yang baṭil.*"

Selain pernyataan di atas, Hamka juga menambahkan dan menguatkan pernyataannya itu dengan mengatakan bahwa "Percaya kepada Allah, itulah yang menumbuh suburkan rasa tanggung jawab."[20]

Pandangan Hamka tentang *tauḥid* ini dapat dibandingkan dengan beberapa pemikir muslim lainnya, seperti Amin Rais. Dia inengatakan "Kedudukan tauhid dalam ajaran Islam adalah paling sentral dan paling esensial." Nurcholish Madjid, sebagaimana Amien Rais, juga mempunyai pandangan yang sama dengan Hamka, bahwa tauhid adalah sumber moral. Dalam kaitannya dengan pandangan ini Nurcholish Madjid mengatakan:

"*Jadi, kehidupan yang penuh kedamalan itu akan dialami oleh manusia, jika ia mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagaimana*

[20] Ibid, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termuat dalam al-Qur'an, yang benisi Ruh atau Jiwa Perintah Tuhan (Roh min al-amri). Jiwa perintah atau ajaran itu hendaknya menyatu begitu rupa dengan diri dan jiwa manusia, sehingga menjadi cahaya (nur) yang menghayati, menghangati, dan menafasi seluruh hidupnya. Semangat demikian, yaitu semangat yang timbul karena resapan mendalam akan rasa Ketuhanan Yang Maha Esa (tauḥid), akan melahirkan kehidupan penuh moral atau akhlak".

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa sumber moral atau tindakan moral bagi seorang muslim seharusnya berasal dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena menurut Hamka *tauḥid* itulah yang seharusnya menggerakkan segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim. Tanpa kepercayaan *tauḥid* itu, maka tindakan atau perbuatan seseorang tidak mempunyai nilai dalam pandangan Islam.

5. Pelaksanaan moral Islam dalam politik

Konteks yang dimaksud adalah situasi yang melingkupi kehidupan kekinian atau kontemporer. Bukan dalam konteks masa lalu, masa silam, yang jauh dan pengalaman hidup manusia sekarang. Dengan kontekstualisasi ajaran etika Islam ini diharapkan dapat mendialogkan ajaran etika Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang disebabkan pergantian zaman.[21]

Hamka, sebagai seorang pemikir Islam, utamanya, sebagai etikus muslim, mempunyai kemampuan untuk melakukan kontekstualisasi etika Islam sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan zaman. Hal yang demikian, dapat dilihat dan penilaian pemikir Islam, misalnya M. Dawam Rahardjo. Sebagai mana pemyataannya berikut:.

"Dengan cara itu Hamka telah melakukan beberapa hal yang penting. Pertama, dia melakukan kontekstualisasi terhadap berbagai pengertian dalam al-Qur'an. Misalnya, dia memberikan arti baru terhadap kata-kata seperti ihsan, amal saleh, tawakkal, dan begitu banyak istilah lain dalam al-Qur'an. Di sini pula dia menginterpretasikan ajaran-ajaran al-Qur'an dengan pengalaman-pengalaman hidup yang konkret. Kedua, dia melakukan semacam rekonstruksi terhadap pengalaman hidup menjadi realitas baru, berdasarkan ayat-ayat yang diperlakukan sebagai teori atau hipotesis.[22] Dengan cara itulah dia menganjurkan kepada orang untuk melakukan pendalaman tcrhadap arti hidup dan pengalaman sehari-hari. Hal mi sangat tampak dalam caranya menginterpretasikan arti bahagia. Dia tidak men jelaskan arti bahagia itu secara verbal yang kerap kali menghasilkan keterangan yang *tautologis*, yang sering kali dilakukan oleh ahli" agama. Dia menjelaskan bahagia dengan berbagai peristiwa konkret, sehmgga arti bahagia itu mengandung berbagai dimensi."

Penilaian Dawam tampaknya dapat dibenarkan dan mendasar, sebab sebagaimana uraian dan penjelasan Hamka terhadap terma-terma tertentu yang terkait dengan etika Islam sangat kontekstual. Terma-terma yang dimaksud, misalnya *ihsan*, amal *saleh*, dan tawakkal diuraikan oleh Hamka

---

[21] Abdul Haris"*Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*"..... 189
[22] Ibid. 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sangat baik dan dikontekstualisasikan dengan keadaan dan situasi yang sedang berkembang saat itu dan bahkan sampai sekarang tampaknya masih sangat relevan.

Hamka menjelaskan tema "*ihsan*" dengan mengatakan bahwa kata itu berarti berbuat kebajikan. Kemudian selanjutnya, dia mengatakan bahwa setengah daripada ihsan adalah mencintai sanak kerabatnya. Ihsan itulah yang mendorong seseorang berbuat jasa, bersusah payah untuk kebahagiaan kerabat, anak dan istri, lorong dan kampung. Hamka mengatakan bahwa ihsan berarti mengorbankan kepentingan dirinya untuk kepentingan memperoleh kebahagiaan bersama. Berbuat kebajikan sangat luas lapangannya. Bahkan, menurutnya, keadilan merupakan bagian dan kebajikan, tetapi tanpa keadilan tidak mungkin ada kebajikan."

Kemudian Hamka menjelaskan kata ihsan tersebut dengan menghubungkan dengan konteks masa itu. Dia menjelaskan kata ihsan dengan menceritakan sebagai berikut:

Hamka memberi contoh yang kedua dengan mengatakan sebagai berikut:

"Contoh yang terjadi di Padang (1934). Seorang anak muda mengarang syair di satu surat kabar. Dia mendapat peringatan pula oleh pemenintah kolonial. Pemimpin redaksi mau menanggung tulisan itu. Tetapi dia sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mau menyerahkan, dia tidak mau orang lain menanggung suatu kesalahan yang timbul dan tangannya sendiri. Dia menyingkirkan pemimpin redaksi dan tanggung jawab. Pengarang itu dijatuhi hukuman dan pemimpin redaksi terbebas, Pemuda itu bemama AR Hadjat."[23]

Hamka kemudian menjelaskan makna kedua contoh yang telah diceritakan itu dengan mengatakan bahwa dalam cerita itu bertemu pertalian antara keadilan dengan kebajikan. Keadilan berarti sikap yang tidak mau menyerahkan kepada orang lain apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, sedangkan sikap mengakui kesalahan sendiri dan berusaha melepaskan orang lain dan bahaya kesalahan, menurut Hamka, disebut kebajikan.

Uraian di atas dapat memberi gambaran tentang kontekstualisasi etika Islam. Dengan metode yang dikemukakan di atas, maka sesungguhnya Hamka telah meng-konteks-kan ajaran Islam dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada masa itu. Kontekstualisasi etika Islam mi dimaksudkan agar konsep-konsep Islam dalam bidang etika dapat dipahami, sehingga ajaran etika Islam dapat menjadi petunjuk bagi umat manusia, utamanya bagi para penganutnya.

---

[23] Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka mempunyai banyak pemikiran tentang kontekstualisasi etika Islam ini. Bukan hanya terdapat pada buku-bukunya yang membahas masalah-masalah agama saja, tetapi tulisan-tulisan Hamka dalam bidang sastra, misalnya banyak menggunakan kontekstualisasi etika Islam mi dengan kebutuhan yang diperlukan dan bermakna bagi penjelasan-penjelasannya.[24]

Politik erat kaitanya dengan pemerintahan. Moral dalam pemerintahan berarti moral yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hal mengelola, mengatur, menyelenggarakan kekeuasaan suatu negara. Hamka menggunakan istilah "budi pemegang pemerintahan", tetapi tampaknya istilah "budi" itu yang di maksud adalah etika terapan atau etika praksis yang masuk dalam bidang etika pemerintahan.

Hamka melihat ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, terutama pemimpin negara atau pemerintahan, yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak yang dipimpinya.[25]

Hal-hal yang harus dilakukan seorang pemimpin pemerintahan adalah sebagaimana tercermin pada surat politik yang ditulis oleh Taher bin Husain kepada anaknya, Abdullah, yang menjadi wali negeri di Riqqah dan Mesi.

---

[24] Abdul Haris"*Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*"..... 192
[25] Abdul Haris"*Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*"..... 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat itu telah disalinkan oleh Hamka di dalam bukunya, Lembaga Budi. Perbuatan dan sikap yang dimaksud sebagai berikut:

Pertama, seorang pemegang pemerintahan seharusnya bertakwa kepada Allah swt. Ketakwaan kepada Allah swt. Itu harus dicerminkan ke dalam sebuah perbuatan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat. Seorang pemimpin harus selalu beramal dengan niat yang ikhlas, sebab itulah yang dapat menyelamatkannya.[26]

Kedua, seorang pemegang pemerintahan seharusnya berbuat ihsan. Berbuat ihsan berarti melakukan pekerjaan yang menguntungkan orang lain. Hendaknya seorang berbuat adil terhadap rakyat, jangan sampai merugikan rakyat.

Ketiga, seorang pemegang kekkuasaan pemerintahan seharusnya selalu menjaga hak milik dan kepentingan rakyat yang dipimpinnya, menjaga kehormatan mereka, menjaga ketentraman mereka, dan menyenangkan.

Keempat, seorang pemimpin pemerintahan seharusnya hati-hati dalam bertindak, sebab tindakannya akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia saja, bahkan nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat.

Kelima, seorang pemimpin pemerintahan seharusnya mengutamakan sholat, sebab shalat dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan

---

[26] Ibid. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkar. Dengan demikian yang dibangun di atas landasan shalat akan juga terhindar dari kemungkaran.

Hamka mengatakan sebagai berikut:

"shalat itulah yang diutamakan lebih dahulu di dalam memegang pemerintahan. Sebabnya maka itu ayah suruh mengutamakan shalat lantaran Allah telah berfirman bahwasanya shalat itu adalah pencegahan dan pekerjaan itu dari dirimu dan rakyatmu. Kemudian itu hendaklah engkau kerjakan sunnah Rasullullah dan ikuti contoh-contoh dari salaf yan saleh sesudah Rasul."

Keenam, seorang pemegang kekuasaan seharusnya mengerjakan setiap pekerjaan dengan hati-hati.[27]

Ketujuh, seorang pemimpin pemerintahan seharusnya banyak berbuat baik kepada orang lain dan juga banyak menolong orang-orang yang lemah.

Kedelapan, seorang pemimpin pemerintahan hendaknya berbaik sangka kepada Allah dan jangan suka menuduh seorang yang engkau serhai mengerjakan tugas, sebelum mengetahuinya sendiri.

Kesembilan, seorang pemimpin tidak boleh bersekutu dengan setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, dengan menghindari itu maka pemimpin akan dapat memelihara kebaikan.

---

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepuluh, seorang pemimpin pemerintah hendaknya menjalankan pemerintahan dalam garis agama, karena agama mengandung ajaran moral yang sangat diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Kesebelas, seorang pemimpin harus memenuhi janjinya, karena banyak pemimpin yang sebelum menjabat banyak mengobral janji, tapi ketika sudah menjadi pemimpin lupa akan janjinya.

Keduabelas, seorang pemimpin hendaknya bersama orang-orang yang suka cinta damai dan jujur, membantu orang-orang sebagai pelopor kebenaran, membelah yang lemah, dan selalu berhubungan silaturahīm dalam segala pekerjaan.[28]

Ketigabelas, seorang pemimpin pemerintahan hendaklah menahan diri, ketika kemarahan sedang berkobar. Dapat menahan dari kemarahan adalah bijak yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin dalam pemerintah.

Keempatbelas, seorang pemimpin tidak boleh tamak, karena ketamakan akan merugikan rakyat banyak, dan dengan begitu pemimpin akan terpancing akan malakukan penyelewengan.

Kelimabelas, seorang pemimpin harus bisa mengatur dirinya sendiri. Strategi yang bagus haruslah ada untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan

[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, dengan perencanaan sedemikian rupa, sehingga hasilnya dapat menguntungkan orang banyak.

Keenambelas, seorang pemimpin harus hati-hati dalam bertindak, karena pemimpin harus menjadi contoh bagi rakyatnya.

Ketujuhbelas, seorang pemimpin pemerintahan jangan berlebih-lebihan menuntut akhirat. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Kedelapanbelas, seorang pemimpin pemerintahan hendaknya memperbanyak bermusyawarah dengan ahli fiqh. Orang Arab mengatakan *ra'su al-hikmati al-masyura*, pokok dan kebijaksanaan adalah musyawarah. Oleh karena agar seorang pemimpin pemerintahan dapat bijaksana maka perlu terus melakukan musyawarah dengan para ahli, teruatama dengan para ahli fiqh.

Kesembilanbelas, seorang pemimpin pemerintahan janganlah menjadi orang yang bakhil. Bakhil adalah sifat yang dilarang oleh Islam, termasuk al-*akhlâq al-madzmûmah.* Sifat bakhil akan menjauhkan seorang pemimpin pemerintahan dengan rakyatnya.

Keduapuluh, seorang pemimpin pemerintahan jangan mengambil jalan syubḥat atau ragu-ragu. 30 Syubḥat adalah sesuatu yang tidak jelas statusnya, antara yang halal dan yang haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keduapuluh satu, seorang pemimpin pemerintahan hendaklah teguh, tenang, pandang, pikirkan, tilik, tadbirkan, dan ambillah i'tibar.' Seorang pemimpin pemerintahan tidak boleh goyah dalam pendirian pada hal-hal yang diyakini kebenarannya yang merupakan hasil keputusan yang telah diambil.

Keduapuluh dua, seorang pemimpin pemerintahan hendaknya selalu memperhatikan baik-baik pajak dan cukai. Penarikan dan penggunaan pajak dan cukai perlu diawasi dengan ketat supaya tidak terjadi penyimpangan.

Keduapuluh tiga, seorang pemimpin pemerintahan hendaknya selalu mengajak manusia untuk menerima kebenaran, meskipun pahit. Seorang pemimpin hendaknya membangun cara berpikir dan menerima sesuatu secara objektif dalam masyarakat.[29]

Keduapuluh empat, seorang peminrpin pemerintahan hendaknya memakai orang-orang yang mempunyai pengetahuan atau ahli *ra'yi,* ahli *tadbir* (ahli administrasi dan perencanaan) orang yang banyak pengalaman dan penglihatan, luas ilmunya dan adil pandangannya dalam hal siasat. " Sebuah keharusan seorang pemimpin pemerintahan untuk menempatkan para ahli yang dibutuhkan sesuai dengan keahliannya.

---

[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keduapuluh lima, seorang pemimpin pemerintahan hendaknya memikirkan akibat-akibat yang akan ditimbulkan apabila akan mengeluarkan sebuah perintah.

Keduapuluh enam, seorang pemimpin pemerintahan jangan menunda pekerjaan dan selalu memohon pertimbangan Tuhan dengan ber-istikharah. Penundaan sebuah pekerjaan berarti membuang kesempatan dan kesempatan yang ada itu belum tentu akan terulang lagi. Kesuksesan banyak ditentukan oleh kepandaian dalam menggunakan kesempatan.

Keduapuluh tujuh, seorang pemimpin pemerintahan seharusnya mengambil teman orang yang dapat berpikir merdeka dan berbudi utama, yang telah diketahui perangainya dan kesetiaannya, serta berani pula menyatakan buah pikirannya pada perkara yang perlu. Seorang yang berbudi baik tidak akan menipu orang lain dan orang yang cerdas dan pandai sedikit kemungkinannya membuat kesalahan dalam bekerja.

Keduapuluh delapan, seorang pemimpin pemerintahan hendaknya menyampaikan atau melaksanakan sendiri, jangan diserahkan pada orang yang lain, urusan fakir miskin atau orang yang tidak sanggup datang sendiri menyampaikan keperluannya, karena takut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keduapuluh sembilan, seorang pemimpin pemerintahan hendaknya melindungi orang-orang lain agama. Orang-orang yang beriman lain harus tetap dijamin keamanannya, jangan sampai mereka terganggu.[30]

Demikian uraian Hamka tentang etika pemerintahan yang lebih merupakan ajaran moral tentang bagaimana sebaiknya ketika seseorang sedang memegang kekuasaan.

Pentingnya moral Islam dalam politik adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik dan demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaaan, jujur dalam persaingan kesediaan untuk menerima pendapat yang lebi besar serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Moral perintahan mengamanatkan agar penyelenggaraan negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya talah melanggar kaidah dan sisitem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amana masyarakat, bangsa dan negara.[31]

---

[30] Abdul Haris"*Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*"..... 150
[31] Abdul Haris"*Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*"..... 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONSEP MORAL DALAM KONTEKS POLITIK INDONESIA

A. Analisis terhadap konsep politik nasional berbasis moralitas menurut Buya Hamka

Berdasarkan pembahasan di Bab III maka penulis dapat menganalisis beberapa pemikiran Hamka tentang negara berbasis moral.

Pada dasarnya negara berbasis moral lahir dan timbul dari suatu etika dan akhlak yang mulanya timbul dari ketauhidan.[1]

Menurut Hamka negara bisa dikatakan negara bermoral apabila pemimpin dan rakyatnya memiliki aturan dalam melakukan tugasnya. Yang dilandasi dengan moral agama Islam.[2]

Dalam kaitannya dengan fase-fase terbentuknya sebuah negara, Hamka berpendapat bahwa suatu umat ialah semua kaum yang telah terbentuk menjadi suatu masyarakat atau kelompok, mereka menjadi satu oleh karena persamaan keyakinan. Hal ini berarti bahwa dalam suatu wilayah negara tertentu tidak ada satu negara pun yang dihuni oleh suatu komunitas masyarakat tertentu (*homogen*). Wilayah negara tersebut senantiasa dipenuhi oleh pluralitas-pluralitas yang ada di wilayah tersebut dengan berbagai konsekuensi yang

---

[1] Abdul Haris"*Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*"..... 69
[2] Ibid, 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharuskan mereka untuk hidup bersama dalam *saffi wilayali* dan negara tertentu. Menurut Hamka, kesamaan pandangan untuk dapat hidup bersama ersebut adalah karena persamaan keyakinan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama, walaupun bersumber dan berbagai unsur yang berbeda, sehingga berawal dan proses inilah suatu negara akan terbentuk.[3]

Negara Indonesia adalah sebuah negara berdaulat, di mana kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat yang terealisir melalui lembaga perwakilan rakyat, dan berdasarkan Pancasila, yang menjiwai seluruh tatanan yang ada dalam negara tersebut. Lebih menarik dalam hal ini, bahwa Pancasila mempunyai keunikan tersendiri, yakni kekuasaan negara diletakkan di bwah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat. Tuhan dan rakyat harus diaca secara berurutan dalam berbagai pemahaman mengai kekuasaan yang ada dalam suatu negara.[4]

Moral bisa dijadikan sebagai penunjuk kualitas dan martabat manusia. Tingkat moral merupakan harkat dan martabat manusia secara normatif, moralitas adalah norma atau standar tingkah laku yang didasarkan atas pertimbangan benar atau salah, baik atau buruk. Persoalan moral adalah bagaimana manusia menahan diri sendiri, menunda kesenangan atau atau keinginan dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Lain halnya dengan binatang yang tidak bisa mengendalikan diri, karena binatang tidak memiliki

---

[3] Ahmad Hakim M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka*... 52
[4] Ibid, 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral. Moral bersifat normatif dan imperative yang diungkapkan dalam kerangka baik dan buruk yang dianggap sebagai nilai mutlak atau transenden, yaitu keseluruhan dari kewajiban-kewajiban manusia. Moral mengacu pada baik buruknya manusia terkati dengan tindakannya, sikapnya, dan cara pengungkapannya. Jadi, moral merupakan hal yang harus dilakukan manusia. Moral menunjukan kualitas dan martabat kepribadian manusia. Tingkat moral merupakan harkat dan martabat manusia secara nomatif.

Hamka juga selalu menyeimbangkan antara peran wahyu dan akal, oleh karenanya corak pemikiran hamka adalah rasional religius. Walaupun demikian sosok Hamka lebih dikenal sebagai sosok yang rasionalis karena dalam pemikiranya yang lain Hamka lebih mengedapankan rasio, terutama ketika Hamka menjelaskan teks-teks yang erat kaitanya dengan agama. Hamka selalu menjadikan wahyu sebagai *postulat-postulat*, dan kemudian dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman.

Pertama, Hamka mempunyai konsep yang utuh tentang politik berbasis moral agama. Menurutnya, hakikat moral adalah pembahasan masalah tingkah laku manusia dan segi nilai baik dan buruk. Hamka melihat dalam pembahasan masalah moral dapat dilihat dan tiga segi; segi filsafat, segi gabungan antara agama dan filsafat dan segi tasawuf.

Hamka membahas etika dan segi gabungan antara agama dan filsafat. Dalam membahas tema-tema etika, Hamka selain membahasnya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan religius juga dipadukan dengan pembahasan secara filosofis. Dengan demikian, syarat menggunakan pemikiran-pemikiran para filosuf untuk memperkuat argumen religiusnya.

Hamka memperkuat bangunan pemikiran etikanya mulai dan pandangan bahwa penilaian tentang baik dan buruk harus dibangun di atas fondasi *tauḥid.* Dengan pandangan ini, maka konsep etika yang dihasilkan merupakan etika religius, tetapi untuk membangunnya Hamka menggunakan penalaran rasional, schingga antara bangunan agama dan filsafat terlihat serasi di dalam pemikiran etikanya.

Kedua, Hamka melihat motivasi melakukan perbuatan moral lebih banyak ditentukan oleh faktor dan internal. Faktor internal yang menentukan perbuatan moral adalah akal Sedangkan syahwat merupakan faktor internal yang mendorong seseorang melakukan perbuatan amoral. Menurut Hamka, manusia dengan akalnya mampu mengetahui dan meakukan perbuatan yang baik karena dalam pandangan Hamka manusia mempunyai kekuatan yang dominan dalam menentukan perbuatannya. Dengan demikian, Hamka melihat perbuatan seorang muslim dalam melakukan perbuatannya, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, adalah pilihan bebasnya dan harus bertanggung jawab terhadapnya.

Hamka melihat motivasi melakukan perbuatan moral bagi seorang muslim adalah dalam rangka mencari *riḍa* Allah Swt., sehingga akan diperoleh kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti. ini berarti kebaikan yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh seorang muslim bukan hanya untuk kepentingan kemanfaatan keduniawiaan semata, tetapi motivasi melakukan perbuatan moral menurutnya bersifat transendental yang didasari oleh sebuah pandangan dunia *tauḥid*. Pandangan dunia tauhid inilah yang kemudian menjadikan seseorang mampu memahami hal-hal yang bersifat *eskatologis*.

Ketiga, Hamka menggunakan pendekatan etika kewajiban dan etika keutamaan. Etika kewajiban yang dibicarakan oleh Hamka adalah seputar masalah aturan-aturan moral yang berlaku untuk perbuatan manusia. Etika kewajiban menilai baik buruknya perbuatan manusia yang berpegang pada norma dan prinsip moral saja. Sedangkan etika keutamaan yang telah dibahas oleh Hamka adalah etika yang mempelajari keutamaan atau sifat yang dimiliki oleh manusia. Hamka membahas masalah keutamaan yang berpangkal pada lima keutamaan; *'iffah, syaja'ah, maḥabbah, 'adil*, dan *ḥikmat*.

Etika kewajiban dan etika keutamaan dalam pandangan Hamka saling melengkapi. Mengetahui saja tentang prinsip dan aturan moral tertentu tanpa harus berusaha untuk menjadikannya sebagai bagian dan hidupnya tidaklah dapat dikatakan sebagai orang budiman. Sebaliknya, seorang yang hanya melakukan sesuatu yang utama, *sebagai* pelaksanaan prinsip dan aturan moral saja, tanpa didasari oleh pengetahuan tentang moralitas yang memadai, tidaklah sempurna.

Keempat, pemikiran etika Hamka meliputi etika teoritis maupun etika terapan. Pemikiran etika teoritis Hamka menyangkut masalah yang berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemikiran masalah moral. Hamka membahas masalah-masalah yang terkait dengan konsep baik dan buruk, hak dan kewajiban, dan keutamaan moral. Sedangkan pemikiran etika terapan Hamka menyangkut masalah yang berkaitan dengan penerapan prinsip dan norma moral. Hamka membahas masalah etika pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, dan etika profesi.

Kelima, pemikiran etika Hamka lebih bercorak rasional religius. Hamka menggabungkan antara pendekatan rasional dan religius dalam membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan etika ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara peran akal dan agama dalam menentukan keputusan moral.

Keenam, pemikiran etika Hamka memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan etika bangsa dalam rangka pembangunan manusia yang beradab yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Kontrihusi pemikiran etika Hamka diwujudkan dalam bentuk konsep relgiusitas moral, kontekstualisasi etika Islam dan konsep etika pembebasan. Selain itu, pemikiran etika Hamka, baik etika teoritis maupun etika terapan, mempunyai relevansi dengan pengembangan konsep etika kehidupan berbangsa dalam konteks Indonesia

Selain itu, Hamka adalah seorang *eklektik*[5], yang selalu berusaha menyeleksi pemikiran-pemikiran etika yang ada, dan yang kemudian mencoba

[5] Bersifat punya pendirian luas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun sistem pemikirannya sendiri, yang antara lain, menggabungkan dari berbagai sistem pemikiran yang ada itu. Secara umum, Hamka membangun etika pembebasan yang berbasis konsep tauhid, dengan implikasi-implikasi yang sangat relevan dalam merekontruksi manusia sempurna yang sesuai dengan pembangunan sumber daya manusia. Dengan landasan ini, Hamka membangun kerangka etika terapan, mulai etika pemerintahan, etika ekonomi dan etika bisnis, dan etika profesi. Oleh karenanya, pemikiran etika terapan Hamka merupakan sumbangsi yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam rangka membangun masyarakat yang berbudi luhur.[6]

B. Kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Buya Hamka.

Dari ulasan di atas penulis berpandangan bahwasanya, ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Buya Hamka mengenai konsep negara berbasis moral.

1. Kelebihan pemikiran Hamka

Dari beberapa pemikiran Hamka dapat kita temukan beberapa kelebihan dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran politik yang lain. Apabila pemikiran Hamka ini diterapkan khususnya di negara kita Indonesia akan sangat cocok, karena negara Indonesia adalah negara pluralis, yang di dalamnya terdapat banyak suku-suku dan agama. Karena Islam sangat

[6] Abdul Haris, *Etika Hamka kontruksi etik berbasis Moral*, ... x

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan. Dengan moral Islam maka politik nasional akan dibawa menuju perdamaian dan kesejahteraan. Bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di kalangan pemerintahan, tapi hal ini akan membawa perdamaian dan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu jika kita bandingkan dengan pemikir muslim lainya seperti halnya Abul A'la al Maududi yang sering menjadi inspirasi bagi pemikir lain. Kecemerlangan Maududi ini rupanya juga dapaat menjadi bahan pembanding bagi Hamka. Namun, berbeda dengan Maududi, Hamka lebih moderat dalam arti negara Islam bukan pilihan mutlak. Oleh karena itu, pluralisme masyarakat dalam konteks negara haruslah dipandang dalam kerangka kemanfaatannya bagi seluruh warga negara yang plural itu. Pluralisme bagi Hamka haruslah tetap dalam bingkai visi, misi yang sama dengan landasan moral agama. Dan inilah politik harus dalam bingkai moral agama pula sesuai dengan sila pertama Pancasila. Berpolitik dalam bingkai moral agama dalam perspektif Hamka adalah berperilaku santun dan etis. Artinya. apapun perbedaan yang ada nilai-nilai kekerasan, perilaku tidak jujur, tidak sopan, mengumbar hawa nafsu, egois harus sejauh mungkin dihindari. Berpolitik dalam arti praktis sesunguhnya sangat terhormat manakala didukung oleh kematangan dan konsistensi pribadi. Sehingga nampak elegan. Jika kita menyaksikan banyaknya para politisi yang berperilaku "tidak terhormat" di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senayan, itu menunjukkan bahwa mereka telah kontrak produktif terhadap nilai moral agama sebagai bingkai prosesnya.

Bagaimanapun nilai moral agama dalam berpolitik itu seharusnya dikedepankan sebagai pilihan terutama bagi politikus muslim.

Kalau boleh membandingkan dengan pemikiran yang berkembang di Amerika Serikat seperti yang diurai oleh Layman dan Carmines yang bahwa politik negara industri maju seperti Amerika Serikat, belakangan cenderung lebih "kultural." Politik bebas nilai telah mereka tinggalkan dan kemudian mereka bergeser dengan memberikan tatanan politik baru atas dasar prinsip-prinsip tradisional dan rasionalitas nilai agama.

Yang unik pemikiran dan berperilaku yang lebih beretika itu semakin mendapat tempat di Amerika yang kemudian menjelma menjadi aliran postmaterialism. Kecenderungan ini memang baru berlangsung di penghujung tahun 90-an, sementara pemikiran Hamka sudah terjadi 30-an tahun lalu. Intinya yang ingin dikatakan disini bahwa jika di Barat saja perilaku politik jauh lebih santun, seharusnya kita yang di Timur dapat lebih beradab.

Demikianlah beberapa pemikiran politik Hamka dalam Tafsir al-Azhar di antara para pemikir politik Islam lainnya, yang diwarnai beberapa persamaan dan perbedaan ide-ide fundamental dan suatu pemikiran yang bersifat mutual-construct, yakni antara sam sama lain saling membangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau hersifat tambal-sulam. Walaupun terdapat berbagai persinggungan pendapat, seraya dibarengi dengan berbagai argurnentasi dan tesis yang mereka sodorkan, akan tetapi persinggungan tersebut bukanlah merupakan hal yang prinsipil dalam konteks pluralitas pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh latar belakang dan psikologi ruang dan waktu yang telah teralami oleh para tokoh dan pemikir tersebut secara berbeda. Karena perbedaan pendapat tersebut merupakan kenikmatan tersendiri bagi dunia intelektual, dan bahkan dapat dikatakan sebagai salah sam bentuk nil dan ijtihad, yang apabila ijtihad tersebut ternyata salah, maka temp dibalas Allah dengan balasan yang sepadan, sebagaimana yang telah Rasulullali sabdakan, bahwa "Perbedaan umatku (mengenai hal-hal yang termasuk dalam konteks keduniaan) merupakan suatu kenikmatan." Dengan demikian, dialektika yang berlangsung seputar bangunan pemikiran politik Islam dan berbagai tokoh dan pemikir politik Islam tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap khazanah keilmuan Islam dan segala hal yang berkaitan.

2. Kekurangan pemikiran Hamka

Dalam hal ini penulis tidak dapat memberikan kekurangan dari pemikiran Hamka, karena penulis merasa pemikiran Hamka sangat cocok apabila diterapkan di Indonesia dengan kondisi saat ini, yang pemerintahannya mulai lepas kendali dari norma agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa pemikiran Buya Hamka mengenai politik nasional berbasis moral.

Pada dasarnya negara berbasis moral lahir dan timbul dari suatu etika dan akhlak yang mulanya timbul dari *ketauhidan*. Menurut Hamka negara bisa dikatakan bermoral apabila pemimpin dan rakyatnya memiliki aturan dalam melakukan tugasnya, yang dilandasi dengan moral Agama Islam.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada para peneliti selanjutnya dalam kaitannya dengan politik berbasis moral menurut pandangan Buya Hamka. Di antaranya adalah:

1. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengenal sosok Buya Hamka sebagai seroang pemikir Muslim, yang telah memberikan ide-ide cemerlang guna membangun dunia Islam. Dengan membangun kembali kesadaran umat Islam akan pentingnya pemahaman yang benar terhadap masalah politik berbasis moral agama Islam. Untuk itu jangan melihat dari sisi negatif dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan tokoh tersebut, melainkan lihatlah ide-ide yang ditawarkan oleh beliau.

2. Sebagai umat Islam yang masih memerlukan sumbangan dari para pemikir muslim, sebaiknya mengadakan penilitian tentang sejauh mana pemikiran *mutakallimin*. Serta sejauh mana pemikiran kedua tokoh tersebut dapat dikembangkan oleh para *mutakallimin* selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris, *Etika Hamka, Kontruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, Yogyakarta: LKIS, 2010

Abdul Haris, *Politik Berbasis Moral*, Artikel , disampaikan dalam seminar "*Dimensi Politik Berbasis Moral*' LPPM Al-Afkar

Ahmad hakim, M.thalhah, *Politik Bermoral Agama*, Yogyakarta: UII pers, 2005

Artikel Hamka, *Hak Perseorangan*, Panji Masyarakat, 1990

Artikel Hamka, *Diri Dan Masyarakat*, Panji Masyarakat, 1990

Hamka, *Studi Islam*, Pustaka Panji Mas.

Fahmi Salatalohy, *Nasionalisme Kaum Pinggiran*, Yogyakarta: LKIS, 2004

Ian Shapiro, *Asas Moral Dalam Politik*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006

Sartiman Setyawan,*Penafsiran Hamka Tentang Politik Dalam Tafsir al-Azhar*."http://*digilib.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digib-uinsuka--sartimanse-1526* (03 april 2009)

Hamka, *Tasauf Pengembangan dan Pemurniannya*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993

Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Hamka, Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id